



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIANTARA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 167158

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/126 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI , Rp. 900.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SPM SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 AT/SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
6. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.501.155.060
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.296.155.060
III. HUTANG	Rp.	87.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.208.555.060

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.